

Home / Pilihan Editor

**Apri Damai Sagita Krissandi**

Universitas Sanata Dharma

Dosen FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Sinyal Hilang Saat Demo, Dari Bredel Malari ke Pembungkaman Era Digital

Sinyal hilang saat demo Jakarta memunculkan pertanyaan tentang kebebasan informasi dan mengingatkan kembali pada pembungkaman pers era Malari.

3 hari lalu

Bagikan Artikel Ini     

Menyukai Artikel

 0*Dok. Tempo, Peristiwa Malari 1974*

Tutup Iklan X

sedang terjadi. Pada 27 Agustus 2026, sejumlah jurnalis yang meliput demonstrasi di depan Gedung DPR mengaku kesulitan mengirim berita dan video karena sinyal mendadak hilang; sebagian bahkan harus menjauh ratusan meter hingga sekitar 1–2 kilometer untuk mendapatkan koneksi.

Apakah ini sekadar gangguan teknis karena kepadatan massa, seperti yang dijelaskan Polda Metro Jaya, atau ada persoalan lain yang belum terungkap? Yang pasti, ketika kamera ada di lokasi tetapi berita tidak bisa dikirim, publik kehilangan mata dan telinganya pada saat yang justru paling membutuhkan informasi.

Pertanyaan itu menjadi semakin penting karena setahun sebelumnya, ketika gelombang demonstrasi juga terjadi, fitur *LIVE* TikTok sempat dinonaktifkan di Indonesia. Pemerintah menyatakan tidak pernah meminta TikTok menghentikan fitur tersebut dan menyebut keputusan itu sebagai tindakan sukarela platform, sementara AJI mengecam kekerasan dan intervensi terhadap jurnalis selama aksi 25–30 Agustus 2025. Jadi, kita tidak boleh sembarangan menyimpulkan bahwa negara sengaja mematikan informasi, tetapi kita juga tidak boleh naif: ketika sinyal hilang, *live report* terputus, jurnalis diintimidasi, dan akses informasi publik terganggu bersamaan dengan demonstrasi, siapa yang sebenarnya sedang kehilangan suara?

Ada satu pelajaran dari Malari 1974 yang seharusnya membuat setiap pemerintah demokratis merasa tidak nyaman: negara tidak perlu lagi membakar kantor media untuk membungkam pers. Cukup membuat wartawan takut menulis, editor takut menerbitkan, dan redaksi takut kehilangan akses kepada kekuasaan. Amnesty International mencatat 13 orang tewas dan 770 orang ditangkap dalam Malari; setelahnya pemerintah melarang penerbitan 11 surat kabar dan jurnal, termasuk *Indonesia Raya*, *Pedoman*, *Abadi*, dan *Harian Kami*.

Hari ini Indonesia tentu bukan Indonesia 1974. Surat Izin Terbit telah menjadi sejarah dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers, tetapi pembungkaman tidak selalu hadir dalam bentuk bredel. Ia bisa hadir melalui intimidasi, ancaman hukum, penghalangan liputan, tekanan ekonomi, pembatasan akses, bahkan ketakutan yang membuat wartawan menyensor dirinya sendiri. Pembungkaman paling efektif bukan ketika negara

Data menunjukkan bahwa kegelisahan itu bukan paranoia. Pada 2025, Dewan Pers memonitor 89 kasus keselamatan pers, terdiri atas 31 kekerasan fisik dan 29 serangan digital; sementara data AJI dan Yayasan TIFA menunjukkan sekitar 72 persen dari 655 jurnalis yang disurvei pernah melakukan swasensor karena berbagai tekanan. Angka itu seharusnya membuat pemerintah gelisah, sebab ketika wartawan sudah takut sebelum menulis, negara tidak perlu lagi turun tangan secara langsung untuk membatasi informasi.

Alarm itu masih menyala pada 2026. Dewan Pers memonitor sedikitnya 11 kasus yang mencakup teror terhadap media, kekerasan fisik, serangan digital, gugatan perdata, hingga dugaan penculikan jurnalis, termasuk dugaan penghalangan kerja wartawan Tempo di Kejaksaan Agung, intimidasi terhadap kru televisi di TPS Jakarta Utara, dan penangkapan wartawan yang mengikuti Global Flotilla. Tidak setiap kasus otomatis dapat disebut kebijakan pemerintah, tetapi rangkaian itu menunjukkan bahwa kebebasan jurnalistik masih menghadapi risiko nyata.

Risiko itu semakin serius ketika jurnalistik bersentuhan dengan hukum pidana. Sepanjang Januari–Juli 2026, Dewan Pers memberikan 60 layanan ahli pers bagi wartawan yang menghadapi proses hukum; 27 berkaitan dengan UU ITE dan 24 dengan KUHP baru, sementara Dewan Pers melihat semakin banyak wartawan dilaporkan atau dipidana bukan hanya karena pemberitaan daring, tetapi juga konten media sosial. Jika wartawan harus menghitung risiko pidana sebelum menulis, kita patut bertanya: apakah demokrasi sedang diperkuat, atau sedang dibangun demokrasi yang takut pada pertanyaan?

Indikator internasional pun tidak memberi alasan untuk berpuas diri. *World Press Freedom Index 2026* menempatkan Indonesia pada peringkat 129 dari 180 negara, dengan skor 43,02, turun dari peringkat 127 pada 2025 dengan skor 44,13; indikator politik berada di 141, sementara indikator ekonomi di 153. RSF menilai kebebasan pers Indonesia masih menghadapi persoalan politik, ekonomi, hukum, sosial, dan keamanan.

Tentu kita harus adil: tidak semua tekanan terhadap media merupakan pembungkaman pemerintah. Media juga bisa salah, wartawan bisa melanggar kode etik, berita bisa tidak berimbang, dan judul bisa sensasional; Dewan Pers menerima 800 pengaduan publik sepanjang Januari–Juli 2026, dengan 454

pengaduan kepada Dewan Pers, dan nukum yang proporsional, bukan dengan intimidasi atau tindakan yang membuat redaksi memilih jalan paling aman daripada jalan paling benar.

Dewan Pers mencatat pada 2025 terjadi perampasan dan penghapusan rekaman wartawan Kompas TV ketika meliput ketegangan di Aceh, serta penghapusan konten CNN Indonesia mengenai kondisi warga terdampak bencana karena kekhawatiran konten tersebut disalahgunakan. Dewan Pers menegaskan bahwa perampasan alat kerja, penghapusan rekaman, dan tekanan terhadap media merupakan bentuk penghalangan kerja jurnalistik yang bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) UU Pers. Ketika kamera dirampas, rekaman dihapus, atau berita tidak dapat dikirim, yang hilang bukan sekadar file, melainkan sebagian hak publik untuk mengetahui kenyataan.

Karena itu, pemerintah harus berhenti merasa tersinggung oleh kamera. Wartawan bukan oposisi, pertanyaan bukan pemberontakan, investigasi bukan makar, dan kritik bukan ancaman keamanan nasional; justru tugas pers adalah menguji apakah yang dikatakan penguasa sesuai dengan yang dialami rakyat. Pemerintah yang merasa kuat seharusnya tidak membutuhkan media yang jinak, sebab pers yang terlalu takut mengganggu pemerintah pada akhirnya bukan lagi pengawas kekuasaan, melainkan dekorasi demokrasi.

Lebih mengkhawatirkan ketika pejabat meminta media tidak menyoroti kekurangan pemerintah, terutama dalam situasi bencana. Dewan Pers mencatat pada 2025 adanya pernyataan sejumlah pejabat negara yang meminta media tidak menyoroti kekurangan pemerintah dalam penanganan bencana; mungkin alasannya menjaga ketenangan atau mencegah kepanikan, tetapi demokrasi harus waspada ketika alasan “situasi tidak kondusif” mulai dipakai untuk menentukan apa yang boleh diketahui publik. Rakyat bukan anak kecil yang harus dilindungi dari kenyataan hanya karena kenyataan itu buruk bagi pemerintah.

Sejarah hampir tidak pernah dimulai dengan kalimat, “Kami akan menghapus demokrasi.” Ia dimulai dengan kalimat yang terdengar masuk akal: jangan diberitakan dulu, jangan memperkeruh keadaan, tunggu situasi kondusif, jangan menyudutkan pemerintah, atau berita ini bisa dimanfaatkan pihak tertentu; jika terus diulang, media mulai mengurangi, wartawan mulai

dengan breidel; nani ini tekanan dapat bekerja melalui nukum, kekerasan, serangan digital, tekanan ekonomi, pembatasan akses, dan rasa takut. Bentuknya berubah, tetapi godaan kekuasaan untuk mengendalikan informasi tidak pernah mati.

Karena itu pemerintah tidak perlu mengatakan bahwa dirinya demokratis; buktikan dengan membiarkan pers mengganggu kenyamanan pemerintah, membiarkan wartawan bertanya ketika pejabat ingin menjawab dengan slogan, membiarkan investigasi membongkar ketika birokrasi ingin menyembunyikan, dan membiarkan kamera merekam ketika kekuasaan ingin mengatakan semuanya baik-baik saja. Pemerintah yang kuat tidak membutuhkan media yang patuh, melainkan media yang bebas mengatakan bahwa pemerintah sedang salah. Jika pemerintah mulai lebih takut pada berita daripada pada kesalahan yang diberitakan, pertanyaannya menjadi sangat sederhana: yang sebenarnya sedang dilindungi itu negara, atau kenyamanan kekuasaan?

#breidel

#wartawan

#ordebaru

Bagikan Artikel Ini



Menyukai Artikel

 0**Apri Damai Sagita Krissandi**

Universitas Sanata Dharma

6 Pengikut[+ Ikuti Penulis](#)

Sinyal Hilang Saat Demo, Dari
Bredel Malari ke Pembungkaman



Anjir Tidak Punya Silsilah, Bajingan
Punya

Lihat Semua Artikel

Baca Juga



Renaldy Bernardo Saragih

Penulis Generasi Z

Seni dan Industri Kreatif: Tangga Terakhir Sebelum Tiba di Level Negara Maju

Penulis Generasi Z - 1 jam lalu

Mengapa China berlari mengejar ketertinggalan dari Hallyu Korea? Hallyu mengejar Hollywood? bukan hanya karena ekonomi, tapi juga Soft Power....



0

☆ Berita Pilihan



A Eddy Adriansyah

Pengrajin Tulisan dan Pekerja Kreatif

Membaca Denyut Jiwa di Antara Abu Vulkanik Krakatau

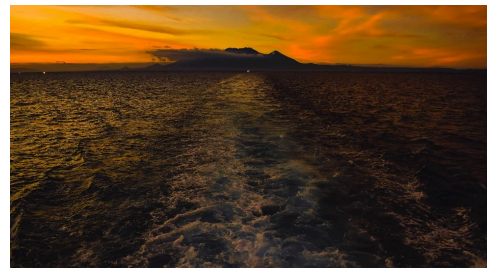
Pengrajin Tulisan dan Pekerja Kreatif - 1 jam lalu

Anak Krakatau erupsi. Selain analisa ilmiah, kita perlu melihat bencana ini dari sisi lain, yaitu menengok sebab erupsi dari sisi spiritual. ...



0

☆ Berita Pilihan



Ninda Aulia

Penulis Indonesiana

Cara Cerdas Mengatur Keuangan Pribadi Agar Bebas Finansial di Usia Muda

Penulis Indonesiana - 2 jam lalu

Temukan strategi praktis mengelola gaji, menekan pengeluaran, dan mulai berinvestasi untuk mengamankan masa depan finansial kamu....



0

☆ Berita Pilihan



Koplo Jawa. Perpaduan Patan Madi dan Nestapa OMK Rendah

Penulis Indonesiana - 2 jam lalu

Sebuah lagu, bagaimanapun, tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia selalu datang dari proses penciptaan yang dipengaruhi oleh konteks realitas....



Nayla Halimatus Sadiyah

Mahasiswa Ilmu Politik, Politik Indonesia

Karhutla 2026: Bencana Antropogenik dan Dosa Korporasi

Mahasiswa Ilmu Politik, Politik Indonesia - 2 jam lalu

Karhutla di Indonesia bukanlah bencana alam murni, melainkan bencana yang dipicu oleh aktivitas manusia...



☆ Berita Pilihan



Muhamad Rizky Saputra

Penulis Indonesiana

Di Balik Game yang Dianggap Remeh, Ada Bisnis yang Tidak Kaleng-kaleng

Penulis Indonesiana - 1 hari lalu

Developer Roblox lokal raup ratusan juta hingga miliaran rupiah berbekal kreativitas dan Roblox Studio gratis....



☆ Berita Pilihan



Lucky Maulana Azhari

Penulis Indonesiana

☆ Berita Pilihan

Sejak negara memungut pajak nyaris di seluruh sendi kehidupan, saya berhenti merayakan kemerdekaan....

 2



Ageng Darmowiyoto
Penulis Indonesiana

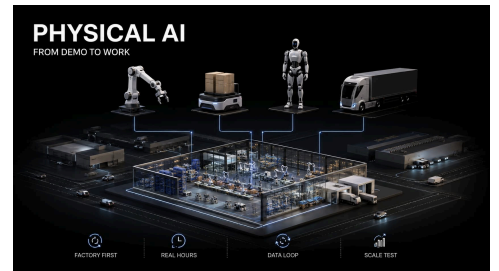
AI Agent Mengubah Cara Perusahaan Menilai Bisnis Software Enterprise

Penulis Indonesiana - 3 hari lalu

Era Baru SaaS, AI Agent Menggeser Model Harga dan Strategi Investasi...

 0

☆ Berita Pilihan



Richard Andi
Penulis Indonesiana

Prabowo, Belajarlah dari Jacob Zuma Sebelum Terlambat

Penulis Indonesiana - 4 hari lalu

Prabowo boleh joget gemoy. Belajar dari Jacob Zuma: populisme tanpa tata kelola negara yang kuat bisa berujung dilengserkan....

 0

☆ Berita Pilihan



Runggu Manalu
Penulis Indonesiana

Ketika Digitalisasi Bisnis Tidak Berjalan Sesuai Harapan

Penulis Indonesiana - 4 hari lalu

Mengapa digitalisasi bisnis tidak selalu berjalan sesuai harapan? Simak tantangan dan hal yang perlu diperhatikan perusahaan....

 0

☆ Berita Pilihan



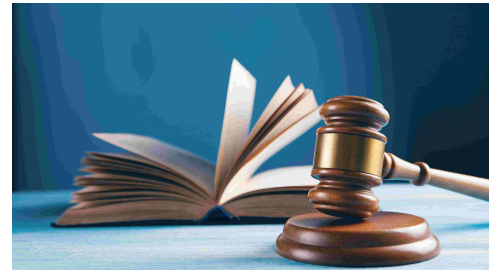
 Konsultan Hukum

Ketika Advokat Berhenti Belajar, Siapa yang Menanggung Risikonya?

Konsultan Hukum - 3 hari lalu

Ukuran yang lebih penting adalah apakah seorang advokat masih memiliki kemauan untuk menguji dirinya sendiri ketika hukum berubah...

 0



Humas Lapas Perempuan Palu

Penulis Indonesiana

LPP Palu Tanam Bibit Pohon Pisang, Hasil Panen Disiapkan untuk Pembinaan WBP

Penulis Indonesiana - Senin, 31 Agustus 2026 10:02 WIB

Lapas Perempuan Palu tanam 17 bibit pisang untuk perkuat ketahanan pangan dan pembinaan tata boga...

 0



Usi Susila

Penulis Indonesiana

AI Mengubah Dunia Kerja dan Perencanaan SDM Indonesia

Penulis Indonesiana - 1 hari lalu

Perkembangan AI mengubah kebutuhan tenaga kerja dan kompetensi. Indonesia perlu menyiapkan SDM melalui perencanaan, reskilling, dan upskilling....

 0



Wisnu Aji Nugroho, Cacp., Qrop.

Praktisi Manajemen Strategis dan Tata Kelola

Bisakah Kampus dan Politeknik Riau Membantu UMKM Menembus Wajib Halal?

Praktisi Manajemen Strategis dan Tata Kelola - 4 hari lalu

Tenggat wajib halal 18 Oktober 2026 dapat menjadi peluang bagi kampus & politeknik Riau menyiapkan mahasiswa sekaligus membantu UMKM naik





Herimirhan S Ag., M Pd

Penulis Indonesiana

Pantaskah Koruptor Dihukum Mati?

Penulis Indonesiana - 1 hari lalu

Koruptor memang harus dihukum. Tetapi yang lebih penting, sistem yang memungkinkan korupsi harus ikut dihukum oleh perubahan....



0



Ageng Darmowiyoto

Penulis Indonesiana

AI Agent Mengubah Cara Perusahaan Menilai Bisnis Software Enterprise

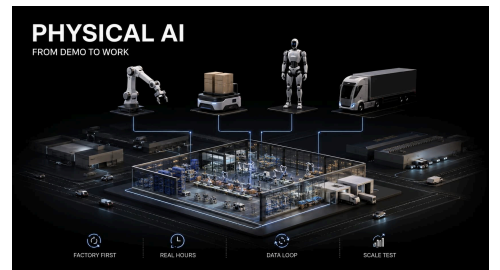
Penulis Indonesiana - 3 hari lalu

Era Baru SaaS, AI Agent Menggeser Model Harga dan Strategi Investasi...



0

☆ **Berita Pilihan**



Djohan Chaniago

Penulis Indonesiana

Sebanyak 17 Kelurahan Jambi Alami Pemadaman Air akibat Dugaan Pencemaran Minyak

Penulis Indonesiana - 1 hari lalu

Karena gangguan limbah minyak di area Pipa Intake, ribuan warga di 17 Kelurahan tidak bisa menggunakan air PDAM ...



0



Sidik Permana

Penulis Indonesiana

Kapan Masalah Hak Asasi Manusia Dianggap Serius?



ini?...



0



Syarifudin Yunus

Penulis Indonesiana

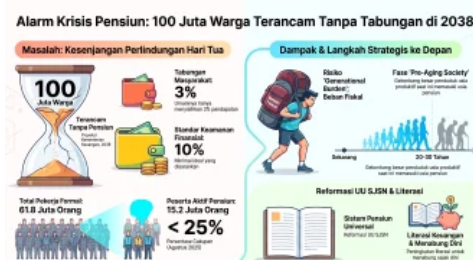
Hanya Sisihkan 3% Gaji, Mampukah Kita Hindari Risiko Miskin di Usia Tua?

Penulis Indonesiana - 4 hari lalu

Indonesia menuju krisis pensiun 2038. Sebanyak 100 juta warga terancam tanpa tabungan hari tua dan jatuh miskin....



0



News Uad

Penulis Indonesiana

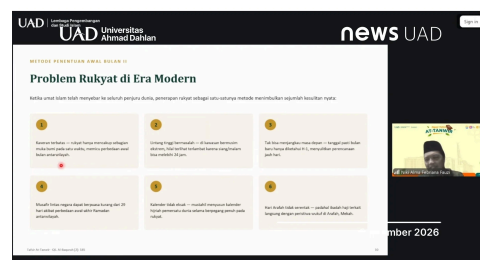
Ngaji Tafsir At-Tanwir Kupas Pesan Al-Baqarah Ayat 185

Penulis Indonesiana - 4 hari lalu

Ngaji Tafsir At-Tanwir oleh Lembaga Pengembangan Studi Islam (LPSI) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) ...



0



Artikel Terbaru



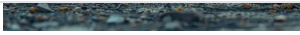
Membaca Cara Kerja Komisi Yudisial Menyeleksi Hakim

1 jam lalu



Komedi Gelap Pendidikan: Menuntut Generasi Emas dari

1 jam lalu



1 jam lalu



**Smart Village Tourism:
Masa Depan Desa
Wisata Indonesia**

1 jam lalu

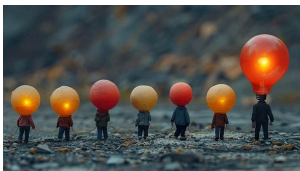


**Ketika Integritas
Menjadi Barang Langka**

1 jam lalu

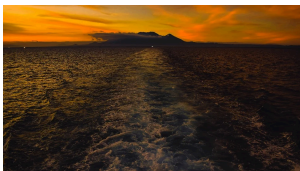
Lihat semua

Terkini di Pilihan Editor



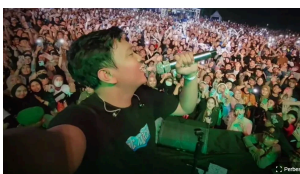
**Seni dan Industri
Kreatif: Tangga Terakhir
Sebelum Tiba di Level**

1 jam lalu



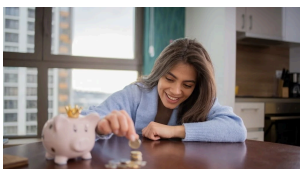
**Membaca Denyut Jiwa
di Antara Abu Vulkanik
Krakatau**

1 jam lalu



**Koplo Jawa: Perpaduan
Patah Hati dan Nestapa
UMR Rendah**

2 jam lalu



**Cara Cerdas Mengatur
Keuangan Pribadi Agar
Bebas Finansial di Usia**

2 jam lalu



**Karhutla 2026: Bencana
Antropogenik dan Dosa
Korporasi**

2 jam lalu

Lihat semua



Menilai Bisnis Software

3 hari lalu



Approval Rating vs Silent Majority: Menakar Dukungan

4 hari lalu



Membaca Denyut Jiwa di Antara Abu Vulkanik Krakatau

1 jam lalu



Seni dan Industri Kreatif: Tangga Terakhir Sebelum Tiba di Level

1 jam lalu



Koplo Jawa: Perpaduan Patah Hati dan Nestapa UMR Rendah

2 jam lalu

Lihat semua

Ketentuan Konten

TEMPO.CO

Q&A Seputar
Indonesiana.id

Koran
Tempo

Ketentuan Layanan

Majalah
Tempo

Kebijakan Privasi

Tempo
English
Magazine

TEMPO.CO
English

Tempo
Store

Tempo
Institute

Analisis

Catatan
Dari
Palmerah

Fiksi

Hiburan

Humaniora

Sport

Pendidikan



**Download
Aplikasi Tempo**

